BAB IV

STANDAR GANDA KEBIJAKAN TURKI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK PERJUANGAN KURDI

Bab ini menjelaskan standar ganda kebijakan Turki terhadap kelompok perjuangan Kurdi. Dua bentuk perwajahan kebijakan pemerintah Turki terhadap kelompok etnis Kurdi tersebut dalam rangka menstabilkan pemerintahan yang ada di Turki. Dua bentuk standar tersebut adalah yang pertama, kebijakan reintegrasi yang menggunakan cara-cara demokratis dalam menenangkan kelompok pemberontak. Sedangkan bentuk kebijakan kedua adalah kebijakan represif yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan dan melemahkan kelompok pemberontak.

Standar ganda kebijakan pemerintah Turki itu akan kita lihat dalam dua kelompok besar perjuangan Kurdi; PKK dan HADEP. Tukri tidak konsisten pada satu kebijakan menghadapi kedua kelompok ini. Dalam beberapa hal, Turki memberikan kebebasan berpolitik kepada kelompok Kurdi serta memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam beberapa hal lainnya, pemerintah memberikan tekanan yang luar biasa pada kelompok Kurdi lainnya dengan menggunakan kekuasaan militer, membatasi pergerakan politik, membatasi perkembangan kebudayaan yang berbau Kurdi serta menerapkan politik pecah belah terhadap gerakan separatis Kurdi yang bertentangan dan dirasa membangkang terhadap pemerintah.

A. KEBIJAKAN REINTEGRASI PEMERINTAH TURKI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK PERJUANGAN KURDI.

Memang tidak mudah mengidentifikasikan kebijakan ganda pemerintah Turki terhadap kelompok Kurdi. Serasa membelah dua sekat tipis dalam setiap kebijakan atau perilaku pemerintah Turki. Bisa jadi kebijakan itu sifatnya baik, namun dalam implementasi kebijakan itu terkadang dibatasi dan dilanggar sendiri oleh aparat pemerintah Turki. Namun, perkembangan kebijakan pemerintah terhadap kelompok Kurdi memang terus mengalami kemajuan seiring semakin dewasanya demokrasi di Turki. Dengan berakhirnya kekuasaan Ataturk, dan perkembangan. Negara menuju demokratisasi, pemerintah Turki semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa membuat Negara Turki menjadi satu warna. Rezim menyadari bahwa banyak kelompok yang dasar identitas mereka tidak berakar dari budaya Turki yang tidak bisa begitu saja melebur menjadi Turki. Sehingga pemerintah harus mencari alternatif lain untuk bisa mengintegrasikan mereka masuk menjadi bagian dari negara dengan pemerintahan yang stabil.

Akan tetapi dalam perkembangan Turki, ketika Sezer menjabat sebagai presiden, pemangku kekuasaan pemerintahan. Memang kebijakan reintegrasi lebih bersifat kebijakan *carrot and stick*. Memberikan peluang kepada kelompok Kurdi untuk bebas berekspresi namun, ada batasan-batasan tak tertulis di dalamnya. Ada kebebasan dengan ketentuan di belakangnya. Sehingga lebih kepada kebijakan bagi-bagi kekuasaan sehingga meredamkan gejolak di negara. Pemerintah Turki memeberikan beberapa pos-pos kekuasaan yang dirasa bisa membuat kelompok Kurdi itu terdiam dan tidak banyak tingkah, pos kekuasaan yang masih dalam

pantauan dan kebijakan dari pemerintah secara langsung. Namun, di sisi lain pemerintah juga membrangus kelompok yang tidak bisa diajak berkompromi.

Ada beberapa kebijakan yang sifatnya reintegrasi yang dilakukan oleh rezim pada masa Sezer terhadap kelompok Perjuangan Kurdi. Diantaranya adalah;

1. Kebijakan Reintegrasi Pemerintah Turki terhadap PKK

Banyak terobosan baru yang dikembangkan oleh Turki dalam masa pendewasaan menuju Negara yang demokratis. Turki sangat memperhatikan juga tentang isu internasional yang tidak pernah usang, hak asasi manusia. Pemerintah Turki tidak hanya kebebasan beragama, tapi juga memberikan kebebasan bergerak bagi gerakan Kurdi di dalam negara, perjalanan luar negeri, emigrasi dan repatriasi. Warga negara secara umum menikmati kebebasan bergerak di dalam negeri dan kebebasan untuk bepergian ke luar negeri, namun kadang-kadang Pemerintah membatasi beberapa hak-hak ini. Konstitusi menyatakan bahwa kebebasan warga negara untuk meninggalkan negara itu dapat dibatasi hanya dalam kasus darurat nasional, kewajiban sipil (dinas militer dan misalnya), atau penyidikan serta penuntutan pidana.[30]

Berhadapan dengan PKK yang lebih memilih perjuangan dengan garis keras, Pemerintah Turki lebih mengintegrasikan mereka dengan jalan sedikit melunak. Ada beberapa indicator yang menunjukkan hal ini. Diantaranya adalah, pemerintah turki terus berusaha untuk terus memberikan permberian perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Kepada Kelompok-kelompok perjuangan Kurdi.

---

[30] H Kilic Ayla.: "Democratization, human rights and ethnic policies in Turkey" Journal of Muslim Minority Affairs." Abingdon:Apr 1998. Vol. 18, Iss. 1, p. 91-110 (20 pp.)

Pengalaman buruk masa lalu, antara 1984 dan 1999, dan terutama di awal 1990-an, cukup memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Turki. Pemerintah memindahkan secara paksa sejumlah besar orang dari desa di wilayah tenggara. Pemerintah membenarkan praktek tersebut sebagai alat untuk melindungi warga sipil atau mencegah teroris seperti PKK memperoleh dukungan logistik dari penduduk. Pemerintah melaporkan bahwa 378.000 orang telah "bermigrasi" (itu membantah istilah "evakuasi") dari keadaan darurat 3.165 wilayah desa antara tahun 1994 dan 1999; banyak pergi karena pertempuran. Berbagai LSM memperkirakan bahwa 1-3 juta orang mengungsi. Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa di 25 provinsi di bekas wilayah keadaan darurat, 4.455 desa dan dusun telah hancur atau sepi.[31]

Pemerintah melalui pemerintah provinsi tetap melarang akses ke beberapa desa ladang dan padang rumput yang tinggi untuk merumput tetapi telah memungkinkan penduduk desa untuk kembali ke tanah mereka. Dalam beberapa kasus, Orang bisa kembali ke rumah lama mereka, dalam kasus lain, Desa terpusat telah dibangun. Hanya sebagian kecil dari jumlah pengungsi telah kembali. Pemerintah memperkirakan bahwa 58.000 orang kembali ke daerah dari bulan Juni 2000 sampai Oktober 2002.

Barulah pada bulan-bulan setelahnya, lebih dari 400 desa dan dusun dilaporkan telah dibuka kembali dengan bantuan negara. Menurut *Human Rights Watch* (HRW), bantuan pemerintah tidak memadai dan berlanjutnya kekerasan oleh aparat keamanan berkecil hati kembali. HRW menyatakan Pemerintah

---

[31] "Turkey's war on the Kurds" diakses pada 15 Agustus 2009. Online dalam http://www.countrystudies.us/turkey/28.htm.

kembali berencana untuk memenuhi standar internasional dan karena itu tidak terkait pendanaan internasional.

Menurut aktivis hak asasi manusia, masyarakat desa, dan beberapa anggota parlemen, Pemerintah tidak mengizinkan pengungsi penduduk desa untuk kembali kecuali mereka menandatangani dokumen yang mengklaim bahwa mereka telah meninggalkan rumah mereka akibat tindakan terorisme PKK, bukan karena tindakan pemerintah, dan menyatakan bahwa mereka tidak akan mencari bantuan Pemerintah untuk kembali.[32]

Walaupun tidak terlalu signifikan, namun dalam beberapa hal pemerintah Turki telah berusaha mengintegrasikan PKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Turki. Sesuai dengan pilar utama Republik Turki yang dicanangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk sejak berdirinya Republik yakni prinsip *"Peace at Home and Peace Abroad (damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional)"*, Turki sudah berusaha dengan berbagai upayanya berusaha meredam pemberontakan yang terus dilakukan oleh PKK. Hasil yang cukup menggembirakan adalah pemerintah Turki terdorong untuk memberikan pengampunan kepada gerilyawan sehingga menempuh cara-cara legal kembali menjadi warga Negara Turki demi kepantingan bersama Kurdi dan juga Turki.

2. Kebijakan Reintegrasi Pemerintah Turki terhadap HADEP

Bagi HADEP, kebijakan reintegrasi yang pemerintah Turki lakukan cukup menggembirakan. Karena Kelompok seperti HADEP akan lebih luas bergerak dengan cara ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan demokrasi yang

[32] Paul J White, ,.: "Economic marginalization of Turkey's Kurds: The failed promise of modernization and reform." Journal of Muslim Minority Affairs." Abingdon:Apr 1998. Vol. 18, Iss. 1, p. 139-158 (20 pp.)

mulai berkembang di Turki. Kebebasan berpolitik seperti sebuah titik tolak untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi keinginan mereka selama ini. Pemerintah Turki juga tidak terlalu mengekang kebebasan berpolitik ini. Pemerintah Turki membiarkan kelompok mana saja yang ingin ikut dalam pesta demokrasi selama tidak mengganggu stabilitas dan juga mengancam keberadaan Negara dengan isu-isu terorisme.

Undang-Undang Dasar memberikan kepada warga negara hak untuk mengubah pemerintah mereka secara damai melaui pemilu.[33] Warga negara secara umum dilaksanakan dalam praktiknya secara berkala, bebas, dan adil. Pemilu yang diadakan berdasarkan hak pilih universal, namun di sisi lain, pemerintah membatasi kegiatan beberapa partai politik dan pemimpin. Negara memiliki sistem parlementer multipartai, di mana pemilu nasional diadakan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun, dengan hak pilih universal wajib bagi semua warga negara usia 18 tahun ke atas. Parlemen memilih presiden sebagai kepala negara setiap 7 tahun atau ketika incumbent menjadi tidak mampu atau meninggal.

HADEP menjadi pelaku utama yang merasakan kebebasan ini. HADEP adalah transpormasi dari *The People's Party of Work* (HEP), *The Party for Freedom and Democracy* (OZDEP) bahkan *The Party of Democracy* (DEP). Tidak melihat dari bagaimana organisasi tersebut berganti karena sebab-sebab tekanan pemerintah atau karena belum mampu melewati ambang batas ketentuan konstitusi, tetap saja terdapat bukti bahwa pemerintah memberikan kesempatan

---

[33] M Hakan Yavuz,.: "A preamble to the Kurdish question: The politics of Kurdish identity" Journal of Muslim Minority Affairs." Abingdon:Apr 1998. Vol. 18, Iss. 1, p. 9-18 (10 pp.)

kepada gerakan Kurdi untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam menentukan pemimpin yang akan mewakili mereka di parlemen.

Sesuai dengan salah satu prioritas HADEP, yakni mendorong pemerintah Turki menerapkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga bisa menciptakan tidak adanya ilegal organisasi di Turki karena setiap orang bebas mengekspresikan keinginannya sendiri, hal tersebut mendapat respon yang cukup positif dari pemerintah Turki.[34]

Konstitusi memberikan kebebasan untuk berkumpul, namun kadang-kadang Pemerintah membatasi hak ini dalam praktek. Pemberitahuan signifikan terlebih dahulu kepada yang berwenang diperlukan untuk sebuah pertemuan, dan pihak berwenang dapat membatasi pertemuan untuk menetapkan tempat-tempat. Pihak berwenang dapat menolak izin untuk berkumpul jika mereka percaya bahwa sebuah pertemuan kemungkinan akan mengganggu ketertiban umum. Asosiasi tidak bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Turki dalam kontak resmi mereka.[35]

Sepanjang tahun, Parlemen menerapkan undang-undang reformasi Oktober 2001 yang merupakan amandemen konstitusi yang memperluas hak kebebasan berkumpul dan berserikat dan menempatkan penekanan pada hak-hak rakyat dan mengurangi jumlah pembatasan kegiatan mereka. Setelah reformasi hukum berlalu pada bulan Agustus, periode pemberitahuan rapat berkurang dari

---

[34] "Turkey, HADEP prohibition!.", op.cit., hlm 35

[35] Ismet Koc ,: "Demographic Differentials and Demographic Integration of Turkish and Kurdish Populations in Turkey" Population Research and Policy Review." Amsterdam:Aug 2008. Vol. 27, Iss. 4, p. 447-457 (11 pp.)

72 jam sampai 48 jam, dan pembatasan partisipasi asing dalam demonstrasi damai.[36]

HADEP kerap kali melakukan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu HADEP juga beberapa kali membuat demonstrasi yang mereka nilai sesuai dengan isu-isu Kurdi seperti 1 September sebagai Hari Perdamaian Dunia.

B. KEBIJAKAN REPRESIF PEMERINTAH TURKI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK PERJUANGAN KURDI.

1. Kebijakan Represif Pemerintah Turki terhadap PKK

Telah jelas peperangan yang dilakukan pemerintah terhadap PKK. PKK yang dicap sebagai organisasi teroris haruslah dimusnahkan. Pemerintah melalui instrument militer telah mengeluarkan banyak biaya untuk membasmi kelompok ini. Tentu saja instrument kekerasan melalui kebijakan militer berlangsung dan memakan korban yang cukup banyak serta merugikan banyak pihak. Kebijakan represif ini seolah-oleh memberikan gambaran bahwa pemerintah Turki ingin menegaskan kepada seluruh organisasi kelompok Turki bahwa pembangkangan terhadap pemerintah akan selalu berakhir pada pembantaian dan kematian.

Berbagai macam bentuk pelanggaran HAM dilakukan oleh Militer untuk menekan kelompok separatis yang dianggap membangkang. Dari penghilangan nyawa tanpa dasar hokum yang jelas, penculikan dan penghilangan orang, penyiksaan kejam dan tidak manusiawi, serta penangkapan sewenang-wenang, penahanan bahkan pembuangan tanpa dasar.

---

[36] Henri J Barkey ,: "The People's Democracy Party (HADEP): The travails of a legal Kurdish party in Turkey." Journal of Muslim Minority Affairs." Abingdon:Apr 1998. Vol. 18, Iss. 1, p. 129-138 (10 pp.)

Wilayah tenggara yang dihuni terutama oleh warga asal Kurdi menjadi butki. Daerah ini terus terganggu oleh pembunuhan tak terpecahkan. Pada bulan Maret lima mayat penuh peluru ditemukan di Provinsi Şırnak. Beberapa korban dilaporkan mengenakan pakaian yang mengidentifikasikan mereka sebagai anggota PKK. Polisi menyelidiki kasus tersebut di akhir tahun 2000.[37]

Pada tahun 2001, Serdar Tanis dan Ebubekir Deniz yang merupakan pejabat HADEP, lenyap secara misterius. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) menerima laporan dari kerabat mereka terkait petisi untuk menyelidiki kasus ini. Pada bulan Februari Pemerintah mengamandemen *Prosedur Penal Code* yang membutuhkan pemberitahuan segera terhadap penangkapan, konsisten dengan amandemen konstitusi yang diadopsi pada Oktober 2001. Namun, menurut Amnesti Internasional, peraturan baru tidak diikuti dalam banyak kasus. Statistik yang akurat tentang hilangnya orang-orang di bawah penahanan, atau yang terlihat dibawa ke tahanan oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum pada tahun-tahun sebelumnya sulit untuk konfirmasi.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menyelidiki dan menjelaskan beberapa kasus yang dilaporkan hilang. Kementerian Dalam Negeri mengoperasikan Biro Investigasi Orang Hilang, yang buka 24 jam sehari. Selama setahun, Direktorat Keamanan Umum mencatat 3.048 orang hilang, sementara 3.986 nama-nama dihapus dari arsip pencarian orang.[38]

Terkait dengan perlakuan, penghukuman dan juga penyisaan kejam tak berprikemanusiaan, konstitusi melarang praktek-praktek seperti itu. Namun,

---

[37] "Turkey : Human Rights Watch Researcher Detained in Shoutheast. Diakses 26 Januari 2010. Online dalam http//www.hrw.org/english/docs/2006/04/12/turkey13171.htm.

[38] *Ibid*

beberapa anggota pasukan keamanan terus secara teratur melakukan penyiksaan, memukul, dan melecehkan orang. Kaum kiri dan orang-orang yang terlibat dengan PKK lebih mungkin menderita penyiksaan dibandingkan dengan kelompok lain. Beberapa faktor yang bisa mengurangi tingkat penyiksaan hanyalah meredanya pertikaian atau menurunnya tingkat kekerasan dengan pihak PKK dan selain itu pengawasan dari Negara tetangga terkait juga keinginan pemerintah untuk menjadi bagian dari Uni Eropa.

Pengamat hak asasi manusia dan para ahli medis mengatakan bahwa pejabat keamanan sering menggunakan metode yang tidak meninggalkan jejak fisik, seperti memukul tahanan dengan tas daripada pemukul atau tinju, atau menggunakan kejutan listrik kepada tahanan yang ditempatkan di tempat duduk, daripada langsung ke tubuh. Namun laporan lainnya menggambarkan hal yang mengerikan terkait penyiksaan. Umum digunakan metode penyiksaan yang dilaporkan oleh Amnesti Internasional termasuk: pemukulan berulang-ulang; penelanjangan serta membuat buta sesaat; tekanan tinggi penyemprot air dingin; kejutan listrik; pukulan pada telapak kaki (falaka) dan alat kelamin; menggantung lengan; makanan dan tidur; beban berat tergantung di tubuh, air menetes ke kepala; luka bakar; menggantung karung pasir di leher; hamper mati lemas dengan menempatkan tas di atas kepalanya; vagina dan anus perkosaan dengan tongkat, dan dalam beberapa kasus, pistol barel; memeras dan memutar dari testikel; dan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Metode lain yang digunakan dipaksa berdiri terlalu lama, isolasi, musik keras, menyaksikan atau mendengar kejadian

penyiksaan, karena didorong ke pedesaan untuk eksekusi pura-pura, dan ancaman terhadap tahanan atau anggota keluarga mereka.[39]

Yuksel azak, distributor koran pro-Kurdi "Yedinci Gundem" yang juga anggota HADEP, menyatakan polisi memberinya kejutan listrik, berkerudung dengan kantong plastik, dan tergantung kepadanya oleh lengan setelah dia ditangkap pada Januari di Bingöl ; kemudian setelah itu ia dibebaskan setelah 3 hari.[40]

Kegagalan untuk menegakkan larangan domestik dan internasional tentang penyiksaan menyuburkan iklim impunitas resmi yang mendorong pelecehan terhadap para tahanan. Tahanan menyatakan bahwa jaksa mengabaikan tuntutan pelecehan mereka selama interogasi. Beberapa jaksa percaya bahwa semua dugaan penyiksaan yang dimanipulasi oleh organisasi-organisasi politik, seperti PKK dan menyatakan bahwa penyiksaan tawanan klaim palsu dan melukai diri mereka untuk menuduh dan mencemarkan nama baik aparat keamanan.

Sebagai akibat dari konflik dengan PKK, Pemerintah terus mengatur dan membayar pasukan pertahanan sipil yang terdiri lebih dari 65.000 orang, terutama di wilayah tenggara. Gaya ini, dikenal sebagai penjaga desa, memiliki reputasi untuk menjadi yang paling disiplin dari pasukan keamanan pemerintah dan telah dituduh berulang kali dari perdagangan narkoba, pemerkosaan, korupsi, pencurian, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengawasan dan kompensasi yang tidak memadai memberikan kontribusi terhadap masalah ini, Selain penjaga desa, dan polisi Jandarma "tim khusus" dipandang sebagai yang paling bertanggung

---

[39] "Turkey's war on the Kurds" diakses pada 15 Agustus 2009. Online dalam http://www.countrystudies.us/turkey/28.htm.

[40] *Ibid*

jawab atas penyalahgunaan-penyalahgunaan wewenang tersebut. Namun tetap saja, insiden dugaan pelanggaran serius oleh aparat keamanan, dalam rangka operasi melawan PKK, jarang diperhatikan pemerintah.

Kondisi penjara tetap miskin, meskipun beberapa perbaikan. Tanpa dana dan miskin fasilitas administrasi tetap menjadi masalah. Kebanyakan penjara kurang perawatan medis yang memadai untuk perawatan rutin atau bahkan darurat medis. Keluarga narapidana sering harus melengkapi makanan berkualitas untuk keluarga mereka karena makanan di penjara yang begitu buruk.

Sampai akhir 2000, penjara dijalankan di sistem bangsal dan sebagian besar tahanan tinggal 30 – 100 orang. Di bawah sistem bangsal, tahanan yang dituduh sebagai teroris dan mereka yang berbeda pandangan ideologis dipenjarakan bersama-sama. Dalam beberapa kasus, penghuni bangsal diindoktrinasi dan dihukum sesama tahanan, sehingga geng dan kelompok teroris mendominasi. Penjara dicegah dari melakukan kegiatan rehabilitasi. Antara Desember 2000 dan Januari 2001, Departemen Kehakiman memindahkan ratusan tahanan yang dituduh sebagai kejahatan terorisme atau kejahatan terorganisir ke dalam sel kecil penjara "F-type".[41] F-tipe didesain lebih mirip penjara yang ditemukan di sebagian besar negara-negara maju; menurut Pemerintah, F-type merupakan penjara yang konsisten dengan rekomendasi CPT (polisi). Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan kelompok narapidana mengklaim bahwa otoritas penjara narapidana F-type terisolasi dari satu sama lain dan akses narapidana dibatasi terhadap air, makanan, listrik, dan toilet. Sebagian besar

---

[41] *Ibid, hal 52*

tahanan F-type diadakan di masing-masing 30 meter persegi. Sistem bangsal dijadwalkan untuk dihapus pada awal 2003.

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang juga terus menjadi masalah. Menurut Asosiasi Hak Asasi Manusia (HRA), terdapat 35.389 penahanan pada akhir September 2001, dibandingkan dengan 35.007 pada tahun 2000. Sepanjang tahun, demonstran ditahan polisi secara rutin, termasuk yang memprotes kondisi penjara. Polisi menahan puluhan anggota hukum partai pro-Kurdi HADEP beberapa kali. Pemerintah terus menahan orang, terutama di wilayah tenggara, karena dicurigai mempunyai hubungan dengan Hizbullah, termasuk guru dan para imam.

Untuk mengambil seseorang ke dalam tahanan, seorang jaksa harus mengeluarkan perintah penahanan, kecuali bila tersangka yang tertangkap melakukan tindak pidana oleh polisi. Di bekas daerah keadaan darurat, penggunaan perintah penahanan jaksa dalam praktek sangat jarang terjadi. Periode penahanan maksimum bagi mereka yang dituntut dengan kejahatan umum individu adalah 24 jam, yang dapat diperpanjang oleh hakim maksimum 7 hari; mereka yang dituduh dengan kejahatan umum kolektif dapat dilaksanakan selama 48 jam.

Terlepas dari semua perlakuan represif pemerintahan Turki, di sisi lain PKK telah menjadi organisasi pemberontak utama etnis Kurdi dan menjadi symbol kuat yang mengatakan dengan lantang bahwa Kurdi harus melawan penindasan pemerintah. PKK menjadi penggalang semangat bagi etnis Kurdi untuk berjuang meneguhkan idenditas asli mereka. Dengan semangat perjuangan

PKK mereka menjadi lebih berani untuk unjuk gigi kepada pemerintah dengan berbagai saran dan cara demi memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

2. Kebijakan Represif Pemerintah Turki terhadap HADEP

Cerita panjang perjalanan perjuangan HADEP cukuplah memberikan gambaran yang gamblang betapa kebebasan berpolitik bagi kelompok gerakan Kurdi sangatlah sulit ketika berhadapan dengan pemerintah Turki. Memang di penjelasan tentang kebijakan reintegrasi telah nyata bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok perjuangan Kurdi dengan jalan reintegrasi politik. Namun, dalam perkembangannya tidak selamanya berjalan baik. Dalam beberapa hal, pemerintah Turki masih mengedepankan represifitas dalam menghadapi intensitas politik kelompok-kelompok seperti HADEP.

Tahun 1989 *Halkin Emek Partisi* (HEP/Partai Buruh Turki) lahir. Partai yang melancarkan kampanye untuk mendukung hak-hak Kurdi. Ketika terjadi insiden perayaan tahun baru Kurdi pada 21 Maret 1992 yang melibatkan banyak polisi pemerintah, HEP melakukan banyak protes. HEP pun akhirnya dilarang pada 14 Juli 1993. Kemudian muncullah OZDEP *(Parti for Freedom and Democracy)* sebagai penerus HEP. Namun, karena program-program yang ditawarkan adalah permasalah Kurdi, akhirnya OZDEP juga menjadi partai terlarang pada 23 Oktober 1993.[42]

---

[42] "The Party of Freedom and Democracy (OZDEP)," Diakses 14 Januari 2010. http://www.ofkparis.org/english/hadep-historique.html.

Setelah itu muncul DEP *(Demokrasi Partisi)* yang didirikan oleh pemimpin-pemimpin partai terlarang HEP.[43] Namun, nasib yang sama juga terjadi pada DEP. DEP diajukan ke pengadilan konstitusi, ketua partainya ditangkap dan dipenjarakan 16 september 1994. Pada bulan juli 1994, partai itu dinyatakan terlarang. Enam wakil DEP telah meninggalkan Turki menuju Eropa, tujuh orang lainnya ditangkap dan mendapat hukuman 15 tahun penjara. Para mantan anggota DEP di Turki lah yang memunculkan HADEP, yang berhasil meraih suara sangat banyak di tenggara dalam pemilihan umum tahun 1995. Namun memang, gagal memberikan pengaruh apapun bagi pemilih Kurdi yang ada di kota-kota besar.

Sekelumit cerita tentang HADEP telah membuktikan bagaimana kebijakan represif pemerintah Turki dalam membatasi kebebasan berpolitik kelompok gerakan Kurdi. Perjalanan HADEP bertahan dan memperjuangkan Kurdi mendapat banyak hambatan dari rezim Sezer ketika berkuasa.

Tidak hanya berupa pengekangan terhadap kebebasan berpolitik, kebijakan represif pemerintah juga sangat terlihat pada pengekangan kebebasan Pers dan Media Massa terkait masalah Kurdi. Secara hukum, konstitusi menyediakan kebebasan untuk berbicara dan pers, namun Pemerintah terus membatasi kebebasan ini dalam beberapa kasus. Pemerintah, terutama polisi dan kehakiman, kebebasan berekspresi terbatas melalui penggunaan pembatasan konstitusional dan banyak hukum termasuk: Pasal 8 tahun 1991 Undang-Undang Anti-Teror (menyebarkan propaganda separatis); Pasal-pasal KUHP 312 (hasutan yang mengarah pada ras, etnis, atau permusuhan agama); 159 (menghina

---

[43] "The People's Party of Work (HEP)". Diakses 14 januari 2010. http://www.ofkparis.org/english/hadep-historique.html.

Parlemen, militer, republik, atau yudikatif); 160 (menghina Republik Turki); 169 (membantu sebuah organisasi ilegal); Undang-Undang untuk Melindungi Ataturk, dan lebih dari 150 artikel dari UU Pers (termasuk ketentuan terhadap komentar pada percobaan yang sedang berlangsung). Sementara puluhan jaksa membawa kasus tersebut ke pengadilan setiap tahun - yang merupakan bentuk pelecehan terhadap penulis, wartawan, dan tokoh-tokoh politik - banyak hakim diberhentikan dengan tuduhan telah melanggar undang-undang ini.[44]

Majalah Independen dalam dan luar negeri yang memberikan spektrum yang luas pandangan dan pendapat, termasuk kritik intens Pemerintah, yang tersedia secara luas, dan bisnis surat kabar itu sangat kompetitif. Namun, item berita pro pemerintah mencerminkan bias. Sebagai contoh, orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan dalam operasi di tenggara sering digambarkan sebagai "teroris" tanpa bukti kegiatan teroris.

Hukum membuat ilegal bagi penyiar untuk mengancam negara kesatuan atau keamanan nasional dan membatasi siaran televisi swasta program dalam bahasa selain Turki yang bukan bahasa dunia, seperti Kurdi. RTUK dipantau penyiar dan disetujui mereka jika mereka sesuai dengan undang-undang yang relevan. Parlemen terpilih sebagai anggota RTUK (dibagi antara yang berkuasa dan partai oposisi) dan menyediakan anggarannya. Walaupun nominal independen, RTUK tunduk pada suatu tekanan politik. Sanksi RTUK radio swasta dan stasiun televisi untuk penggunaan bahasa ofensif, pencemaran nama baik, cabul, menghasut propaganda separatis, atau program siaran dalam bahasa Kurdi.

---

[44] Umit Sakallioglu Cizre ,: "Kurdish nationalism from an Islamist perspective: The discourses of Turkish Islamist writers" Journal of Muslim Minority Affairs." Abingdon:Apr 1998. Vol. 18, Iss. 1, p. 73-89 (17 pp.)

Secara umum siaran televisi RTUK ditangguhkan selama 1 hari, dan siaran radio lebih lama istilah-istilah seperti 3 sampai 6 bulan, biasanya karena melanggar undang-undang yang melarang siaran "deklarasi organisasi teroris." RTUK keputusan dapat memohon kepada Pengadilan Administratif Provinsi dan kemudian ke Dewan Negara (Danistay). Dalam beberapa kasus, banding seperti itu berhasil.

Pada bulan Februari Fatih Tas penerbit Kurdi dibebaskan atas tuduhan mengancam negara Turki dengan menerbitkan kumpulan tulisan dalam bahasa Turki akademis asing Noam Chomsky, tulisan-tulisan yang menuduh pemerintah menindas suku Kurdi asal Turki. Pada bulan Agustus Keskin Abdullah didakwa atas tuduhan separatis propaganda untuk mengedit edisi Turki di Kurdistan sebuah buku yang ditulis oleh seorang wartawan asing.

Pemerintah melanggar 'hak privasi warga negara. Pembatasan atas kebebasan berbicara dan pers tetap menjadi masalah serius. Wartawan terus berlatih *self-sensor*. Pada banyak kasus, Pembatasan Pemerintah terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat berujung pada pemukulan Polisi. Mereka yang dianggap melanggar disiksa dan ditahan. Pemerintah terus memaksakan beberapa pembatasan pada agama minoritas dan pada beberapa bentuk ekspresi keagamaan. Pada kasus lainnya, Pembatasan Pemerintah terhadap kebebasan bergerak. Pemerintah membatasi kegiatan beberapa partai politik dan pemimpin. Pemerintah terus melecehkan pro-Kurdi Partai Demokrasi Rakyat (HADEP), serta terkait erat dengan Partai Rakyat Demokratik (DEHAP), melalui berbagai metode termasuk serangan polisi dan penahanan, walaupun ada sedikit contoh

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus melecehkan, menuduh, dan memenjarakan hak asasi manusia monitor, wartawan, dan pengacara untuk ide-ide yang diungkapkan dalam forum-forum publik. Cabang dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah ditutup, untuk sementara atau selamanya, terutama di tenggara. Pemerintah secara tidak proporsional memberikan tekanan pada LSM Kurdi di tenggara. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tetap masalah serius, dan diskriminasi terhadap perempuan tetap bertahan. Ada pembatasan terhadap hak-hak buruh. Buruh anak tetap menjadi masalah. Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak perempuan, tetap menjadi masalah.

Seperti fakta yang dipaparkan pada poin kedua bentuk kebijakan represif terhadap gerakan separatis menyebabkan munculnya aktor utama garis keras yakni PKK, kelompok yang memperjuangkan kebebasan Kurdi dari Turki. Ini menyebabkan ketakutan tersendiri bagi pemerintah Turki bahwa ini akan berdampak luas pada seluruh masyarakat Kurdi, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Mengingat komunitas etnis Kurdi yang terletak di tiga Negara tetangga Turki lainnya. PKK telah menjelma menjadi ikon perlawanan bangsa Kurdi terhadap penindasan pemerintah tempat mereka bernaung.

Oleh karena itu, dengan cermat pemerintah Turki langsung menerapkan sistem sycological war. Dengan memberangus akar pemberontakan dan membuat klaim-klaim bahwa mereka adalah kelompok teroris. Dengan label kelompok teroris terhadap gerakan separatis yang bersebrangan dengan pemerintah, pemerintah Turki bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan

pertama, bagi kelompok lain Kurdi yang lain yang berada di Turki, akan sangat cermat memutuskan ketika akan berhubungan dengan PKK. Jika saja ada indikasi mereka melakukan kontak dengan PKK, maka militer akan menemukan alasan bagi kelompok tersebut untuk dibredel dan dimusnahkan. HADEP contohnya, tidak akan pernah mengakui bahwa mereka punya hubungan dengan PKK, karena itu akan membahayakan keberlangsungan organisasi mereka. Ketua HADEP mengatakan bahwa "kami tidak punya hubungan organik apapun dengan PKK."

Keuntungan kedua adalah dari segi internasional. Baik itu Negara tetangga, aktor Kurdi di luar Turki, juga masyarakat internasional seperti PBB, Uni Eropa dan juga yang lainnya. Dengan label kelompok teroris tersebut, pemerintah Turki akan punya alasan kuat untuk bisa mengelak jika mereka dikenakan tuduhan telah melakukan banyak pelanggaran HAM. Ini juga akan semakin menyempitkan akses bagi PKK untuk mendapatkan dukungan dari internasional.